

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusaan masalah bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya terealisasi, hal ini dapat dilihat dari :

1. Bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor tidak terpungut di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur tahun 2018 sekitar 94.80% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut atau tertunggak. Tahun 2019 sekitar 95.77% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut atau tertunggak. Tahun 2020 sekitar 113,15% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut atau tertunggak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020, secara umum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Luasnya wilayah dan Pembayaran secara online
2. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu melakukan atau mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak (SUPER PKB) ; Membuat Membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat waktu , Membuka Samsat Keliling, Membuka Samsat Drive Thure Memberi keringanan pemutihan denda PKB dan Bea Balik Nama. Berdasarkan aturan pada Samsat Kabupaten Flores Timur untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran sebatas kemampuan penulis antara lain :

1. Membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat waktu  
Reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan pembayaran pajak tepat waktu.
2. Membuka Samsat Keliling  
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Gerai Samsat Keliling hanya untuk pajak tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke Kantor Samsat. Pelayanan Samsat Keliling diberikan untuk memudahkan masyarakat agar taat hukum.
3. Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur, sebaiknya membuka penetapan gerai-gerai Conner samsat didaerah-daerah pelosok yang belum ada dengan kawasan yang lebih luas.
4. Membuat Kebijakan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut juga menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari pajak.
5. Memberi keringanan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan pembebasan baik atas denda maupun bunga PKB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Ariasih Ni Nyoman Pande. 2012. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010*.  
[http://repositorymaranatha.edu/18731/2/0951065\\_Chapter1.pdf](http://repositorymaranatha.edu/18731/2/0951065_Chapter1.pdf)
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jogjakarta : Penerbit Salemba Empat
- Ikhsan Muhammad Al. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tambusai*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/109396-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Pengadaan (Eprocurement). 2019. *Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pengertian dan Sumber-Sumber PAD*. <https://www.pengadaan.web.id/2019/10/pendapatan-asli-daerah-pad.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.  
<http://peraturan.bpk.go.id>
- Prasedyawati Lintan Gupita. 2012. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011*.
- Siyoto Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sudaryo Yoyo, Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Syafruddin Faisal. 2003. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.html>
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
<https://www.djpk.kemenkeu.go.id%2Fattach%2Fpost-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

Wulandari Phaureula Artha, Emy Iryane. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama).

Yustiva Sari Vika Ferna. 2008. *Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pajak Daerah pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati*.